



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH, DAN BANTUAN
KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari perhitungan Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil, sehingga Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat

- II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH, DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 3) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 38

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN

2025 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN

ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN

BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH, DAN BANTUAN

KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu BHPD per- Desa	TOTAL PAGU BHPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)
1	SUNGAI RAYA	HAMALAU	256.250	446.129	702.379	702.000
2	SUNGAI RAYA	TELAGA BIDADARI	256.250	248.964	505.214	505.000
3	SUNGAI RAYA	KARASIKAN	256.250	182.387	438.637	439.000
4	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA UTARA	256.250	174.162	430.412	430.000
5	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA SELATAN	256.250	251.429	507.679	508.000
6	SUNGAI RAYA	HARITI	256.250	178.804	435.054	435.000
7	SUNGAI RAYA	IDA MANGGALA	256.250	239.970	496.220	496.000
8	SUNGAI RAYA	BUMI BERKAT	256.250	147.194	403.444	403.000
9	SUNGAI RAYA	BATANG KULUR KIRI	256.250	190.386	446.636	447.000
10	SUNGAI RAYA	BATANG KULUR TENGAH	256.250	176.515	432.765	433.000
11	SUNGAI RAYA	BATANG KULUR KANAN	256.250	175.278	431.528	432.000
12	SUNGAI RAYA	BARU	256.250	146.603	402.853	403.000
13	SUNGAI RAYA	TAMIYANG	256.250	294.291	550.541	551.000
14	SUNGAI RAYA	ASAM	256.250	167.941	424.191	424.000
15	SUNGAI RAYA	SUNGAI KALI	256.250	134.307	390.557	391.000
16	SUNGAI RAYA	SARANG HALANG	256.250	293.455	549.705	550.000
17	SUNGAI RAYA	PARING AGUNG	256.250	208.638	464.888	465.000
18	SUNGAI RAYA	TANAH BANGKANG	256.250	125.241	381.491	381.000
19	PADANG BATUNG	KARANG JAWA MUKA	256.250	201.377	457.627	458.000
20	PADANG BATUNG	KARANG JAWA	256.250	207.882	464.132	464.000
21	PADANG BATUNG	TABIHI	256.250	185.116	441.366	441.000
22	PADANG BATUNG	PANDULANGAN	256.250	304.383	560.633	561.000
23	PADANG BATUNG	KALIRING	256.250	205.750	462.000	462.000
24	PADANG BATUNG	JAMBU HULU	256.250	234.015	490.265	490.000
25	PADANG BATUNG	PAHAMPANGAN	256.250	75.884	332.134	332.000
26	PADANG BATUNG	PADANG BATUNG	256.250	106.405	362.655	363.000
27	PADANG BATUNG	JEMBATAN MERAH	256.250	208.219	464.469	464.000
28	PADANG BATUNG	BATU BINI	256.250	246.728	502.978	503.000
29	PADANG BATUNG	MAWANGI	256.250	225.251	481.501	482.000
30	PADANG BATUNG	MADANG	256.250	172.634	428.884	429.000
31	PADANG BATUNG	DURIAN RABUNG	256.250	95.401	351.651	352.000
32	PADANG BATUNG	JELATANG	256.250	88.031	344.281	344.000
33	PADANG BATUNG	BATU LAKI	256.250	290.206	546.456	546.000
34	PADANG BATUNG	MALUTU	256.250	223.000	479.250	479.000
35	PADANG BATUNG	MALILINGIN	256.250	300.260	556.510	557.000
36	TELAGA LANGSAT	LOK BINUANG	256.250	181.580	437.830	438.000
37	TELAGA LANGSAT	TELAGA LANGSAT	256.250	170.124	426.374	426.000
38	TELAGA LANGSAT	MANDALA	256.250	174.768	431.018	431.000
39	TELAGA LANGSAT	AMPUTUN	256.250	118.240	374.490	374.000
40	TELAGA LANGSAT	HAMAK	256.250	136.150	392.400	392.000
41	TELAGA LANGSAT	HAMAK TIMUR	256.250	106.785	363.035	363.000
42	TELAGA LANGSAT	HAMAK UTARA	256.250	149.593	405.843	406.000
43	TELAGA LANGSAT	PAKUAN TIMUR	256.250	139.648	395.898	396.000
44	TELAGA LANGSAT	GUMBIL	256.250	219.441	475.691	476.000
45	TELAGA LANGSAT	LONGAWANG	256.250	121.745	377.995	378.000
46	TELAGA LANGSAT	PANDULANGAN	256.250	92.553	348.803	349.000
47	ANGKINANG	BAMBAN UTARA	256.250	168.178	424.428	424.000
48	ANGKINANG	BAMBAN	256.250	142.758	399.008	399.000
49	ANGKINANG	BAMBAN SELATAN	256.250	115.020	371.270	371.000
50	ANGKINANG	KAYU ABANG	256.250	321.969	578.219	578.000
51	ANGKINANG	ANGKINANG	256.250	182.721	438.971	439.000
52	ANGKINANG	TELAGA SILI-SILI	256.250	226.829	483.079	483.000
53	ANGKINANG	ANGKINANG SELATAN	256.250	196.990	453.240	453.000
54	ANGKINANG	TAWIA	256.250	279.196	535.446	535.000
55	ANGKINANG	TANIRAN KUBAH	256.250	201.293	457.543	458.000
56	ANGKINANG	TANIRAN SELATAN	256.250	84.030	340.280	340.000
57	ANGKINANG	BAKARUNG	256.250	339.157	595.407	595.000
58	KANDANGAN	GAMBAH LUAR	256.250	51.707	307.957	308.000
59	KANDANGAN	GAMBAH LUAR MUKA	256.250	332.555	588.805	589.000
60	KANDANGAN	GAMBAH DALAM	256.250	104.014	360.264	360.000
61	KANDANGAN	GAMBAH DALAM BARAT	256.250	111.560	367.810	368.000
62	KANDANGAN	SUNGAI KUPANG	256.250	204.906	461.156	461.000
63	KANDANGAN	BANGKAU	256.250	151.794	408.044	408.000
64	KANDANGAN	LUNGAU	256.250	148.674	404.924	405.000
65	KANDANGAN	SUNGAI PARING	256.250	98.190	354.440	354.000
66	KANDANGAN	BARIANG	256.250	149.630	405.880	406.000
67	KANDANGAN	AMAWANG KIRI	256.250	276.580	532.830	533.000
68	KANDANGAN	AMAWANG KIRI MUKA	256.250	220.362	476.612	477.000
69	KANDANGAN	AMAWANG KANAN	256.250	230.780	487.030	487.000
70	KANDANGAN	TIBUNG RAYA	256.250	420.704	676.954	677.000
71	KANDANGAN	BALUTI	256.250	485.585	741.835	742.000
72	SIMPUR	TEBING TINGGI	256.250	225.408	481.658	482.000
73	SIMPUR	SIMPUR	256.250	247.872	504.122	504.000

74	SIMPUR	GARUNGANG	256.250	187.126	443.376	443.000
75	SIMPUR	AMPARAYA	256.250	219.735	475.985	476.000
76	SIMPUR	PANJAMPANG BAHAGIA	256.250	154.005	410.255	410.000
77	SIMPUR	ULIN	256.250	361.671	617.921	618.000
78	SIMPUR	PANTAI ULIN	256.250	291.584	547.834	548.000
79	SIMPUR	WASAH HULU	256.250	139.771	396.021	396.000
80	SIMPUR	WASAH TENGAH	256.250	191.057	447.307	447.000
81	SIMPUR	WASAH HILIR	256.250	208.946	465.196	465.000
82	SIMPUR	KAPUH	256.250	188.568	444.818	445.000
83	DAHA SELATAN	MUNING BARU	256.250	122.616	378.866	379.000
84	DAHA SELATAN	MUNING DALAM	256.250	130.122	386.372	386.000
85	DAHA SELATAN	MUNING TENGAH	256.250	86.988	343.238	343.000
86	DAHA SELATAN	BANJARBARU	256.250	164.234	420.484	420.000
87	DAHA SELATAN	BAYANAN	256.250	311.060	567.310	567.000
88	DAHA SELATAN	PANDAN SARI	256.250	92.822	349.072	349.000
89	DAHA SELATAN	PIHANIN RAYA	256.250	146.498	402.748	403.000
90	DAHA SELATAN	TUMBUKAN BANYU	256.250	221.977	478.227	478.000
91	DAHA SELATAN	SUNGAI PINANG	256.250	176.539	432.789	433.000
92	DAHA SELATAN	HABIRAU	256.250	146.018	402.268	402.000
93	DAHA SELATAN	HABIRAU TENGAH	256.250	133.753	390.003	390.000
94	DAHA SELATAN	PARIGI	256.250	143.002	399.252	399.000
95	DAHA SELATAN	BANUA HANYAR	256.250	99.338	355.588	356.000
96	DAHA SELATAN	TAMBANGAN	256.250	205.844	462.094	462.000
97	DAHA SELATAN	BARUH JAYA	256.250	252.648	508.898	509.000
98	DAHA SELATAN	SAMUDA	256.250	133.073	389.323	389.000
99	DAHA UTARA	PAKAPURAN KECIL	256.250	99.518	355.768	356.000
100	DAHA UTARA	PANGGANDINGAN	256.250	100.219	356.469	356.000
101	DAHA UTARA	TAMBAK BITIN	256.250	140.965	397.215	397.000
102	DAHA UTARA	PAKAN DALAM	256.250	153.171	409.421	409.000
103	DAHA UTARA	PARAMAIAN	256.250	180.899	437.149	437.000
104	DAHA UTARA	PANDAK DAUN	256.250	106.152	362.402	362.000
105	DAHA UTARA	MURUNG RAYA	256.250	85.830	342.080	342.000
106	DAHA UTARA	BALAH PAIKAT	256.250	53.691	309.941	310.000
107	DAHA UTARA	SUNGAI GARUDA	256.250	61.150	317.400	317.000
108	DAHA UTARA	SUNGAI MANDALA	256.250	77.943	334.193	334.000
109	DAHA UTARA	MDL. MURUNG MESJID	256.250	111.121	367.371	367.000
110	DAHA UTARA	BARUH KEMBANG	256.250	106.896	363.146	363.000
111	DAHA UTARA	TELUK HAUR	256.250	164.211	420.461	420.000
112	DAHA UTARA	PASUNGKAN	256.250	96.810	353.060	353.000
113	DAHA UTARA	TELUK KABAK	256.250	166.568	422.818	423.000
114	DAHA UTARA	HAMAYUNG	256.250	168.340	424.590	425.000
115	DAHA UTARA	HAMAYUNG UTARA	256.250	299.815	556.065	556.000
116	DAHA UTARA	PAHARANGAN	256.250	178.470	434.720	435.000
117	DAHA UTARA	HAKURUNG	256.250	51.437	307.687	308.000
118	KALUMPANG	BALIMAU	256.250	196.093	452.343	452.000
119	KALUMPANG	KARANG PACI	256.250	154.465	410.715	411.000
120	KALUMPANG	BAGO TANGGUL	256.250	115.579	371.829	372.000
121	KALUMPANG	KARANG BULAN	256.250	138.795	395.045	395.000
122	KALUMPANG	BALANTI	256.250	152.899	409.149	409.000
123	KALUMPANG	KALUMPANG	256.250	137.077	393.327	393.000
124	KALUMPANG	TAMBINGKAR	256.250	158.558	414.808	415.000
125	KALUMPANG	SIRIH	256.250	224.270	480.520	481.000
126	KALUMPANG	SIRIH HULU	256.250	133.264	389.514	390.000
127	LOKSADO	HALUNUK	256.250	91.888	348.138	348.000
128	LOKSADO	PANGGUNGAN	256.250	34.591	290.841	295.000
129	LOKSADO	LUMPANGI	256.250	126.454	382.704	383.000
130	LOKSADO	MALINAU	256.250	76.004	332.254	332.000
131	LOKSADO	HULU BANYU	256.250	168.812	425.062	425.000
132	LOKSADO	TUMINGKI	256.250	72.118	328.368	328.000
133	LOKSADO	KAMAWAKAN	256.250	85.495	341.745	342.000
134	LOKSADO	LOK LAHUNG	256.250	43.520	299.770	300.000
135	LOKSADO	LOKSADO	256.250	131.042	387.292	387.000
136	LOKSADO	HARATAI	256.250	87.882	344.132	344.000
137	LOKSADO	ULANG	256.250	106.313	362.563	363.000
138	DAHA BARAT	SIANG GANTUNG	256.250	116.354	372.604	373.000
139	DAHA BARAT	BARU	256.250	130.132	386.382	386.000
140	DAHA BARAT	TANJUNG SELOR	256.250	96.533	352.783	353.000
141	DAHA BARAT	BADAUN	256.250	72.816	329.066	329.000
142	DAHA BARAT	BAJAYAU	256.250	112.820	369.070	369.000
143	DAHA BARAT	BAJAYAU TENGAH	256.250	165.504	421.754	422.000
144	DAHA BARAT	BAJAYAU LAMA	256.250	77.196	333.446	333.000
Total			36.900.000	24.600.000	61.500.000	61.500.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR